

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN SRAGEN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

**SESARIA HADIANI
L2D 005 401**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

ABSTRAK

Proses industrialisasi saat ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan saja. Daerah-daerah pinggiran dengan lingkup kabupaten seringkali berlomba-lomba dalam memajukan perindustrian di wilayahnya. Salah satu upaya yang seringkali dilakukan pemerintah daerah yaitu menciptakan iklim investasi melalui berbagai kebijakan probisnis. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UKM antara lain (Tambunan, 2001) fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan, relevansi UKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain, potensi UKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta peranan UKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.

Keberhasilan Kabupaten Sragen dalam peningkatan pelayanan publik dalam rangka perwujudan good governance memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Saat ini Kabupaten Sragen telah dijadikan best practice oleh beberapa daerah dalam pelayanan publiknya. Peraturan Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Sragen saat ini sangatlah mendukung iklim usaha dan investasi, salah satu indikatornya yaitu jumlah pemohon perizinan usaha yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, serta jumlah PDRB dari sektor industri yang semakin meningkat pula. Akan tetapi di sisi lain dengan semakin berkembangnya industri di Kabupaten Sragen, ternyata juga diiringi dengan beberapa permasalahan atau dampak negatif dari berbagai kebijakan probisnis tersebut. Salah satunya yaitu adanya pabrik industri yang setelah dibangun ternyata tidak dapat dioperasionalkan, serta masalah lingkungan terutama tentang pembuangan limbah industri yang saat ini masih belum terlalu diperhatikan pemerintah. Selain itu, survei iklim usaha yang dilakukan GTZ menyatakan bahwa pelayanan publik dinilai masih buruk.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangatlah besar kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam implementasi kebijakan UMKM. Fenomena-fenomena tersebut melatarbelakangi pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Sragen? Sejauh mana efektivitas kebijakan probisnis tersebut? Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Sragen, melalui sasaran pencapaian yang terbagi menjadi 2 analisis yaitu analisis aspek penyediaan sarana prasarana pendukung UMKM yang meliputi 8 variabel dan analisis penciptaan insentif pengembangan UMKM yang terdiri atas 5 variabel. Penelitian ini memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga perlu suatu wilayah batasan wilayah yaitu UMKM yang diteliti hanya manufaktur (non-pertanian). Adapun batasan materi yaitu 10 dokumen kebijakan dan variabel-variabel yang telah ditentukan berdasarkan kajian literatur. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, dengan teknik analisis terbagi menjadi 2 yaitu telaah dokumen kebijakan dan deskriptif komparatif untuk membandingkan hasil telaah dokumen dengan kondisi di lapangan, serta menilik kembali kondisi ideal dalam kajian teori. Obyek penelitian yang dijadikan data antara lain dokumen kebijakan, lokasi industri, dan narasumber. Teknik memperoleh data yaitu melalui wawancara kepada narasumber yang terdiri atas instansi pemerintah dan pelaku UMKM, serta observasi lapangan.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan UMKM di Kabupaten Sragen ternyata belum efektif, dilihat dari 13 variabel kebijakan yang diteliti, baru 8 variabel yang dikatakan baik (implementasi sesuai dengan kebijakan) yaitu penyediaan bantuan peralatan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, pajak daerah, retribusi, serta perizinan. Dari kondisi tersebut dapat diketahui pula tipe kebijakan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yaitu protection policy melalui pemberian insentif-insentif, akan tetapi pada akhirnya merujuk kepada developmentalist yang mana dalam pelaksanaannya ternyata lebih mengutamakan UMKM unggulan. Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah antara lain segera mengaktifkan bidang UMKM dalam Disperindag, konsistensi dalam penetapan kriteria kebijakan, serta membangun suatu sentra penjualan oleh-oleh khas Sragen sebagai wadah pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Adapun rekomendasi untuk pelaku UMKM yaitu agar lebih meningkatkan kesadaran pribadi untuk lebih bersikap proaktif terhadap pemerintah.

Keywords: implementasi kebijakan, industri kecil dan menengah, penyediaan sarana prasarana, insentif pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri dan jasa seringkali dijadikan sebagai “payung” dalam proses pembangunan daerah (JICA, 2004). Pengembangan industri mendapatkan tantangan semakin besar dengan semakin kuatnya gelombang globalisasi. Salah satu dampak dari globalisasi ini adalah semakin meningkatnya persaingan antara satu negara dengan negara lain dalam menarik investasi. Persaingan juga terjadi pada tingkat yang lebih kecil, yaitu pada daerah-daerah. Pada kasus Indonesia, persaingan ini juga dipicu oleh adanya perubahan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang muncul pada era pasca-Soeharto.

Semenjak kebijakan pemerintah tidak lagi mengandalkan ekspor migas, industri manufaktur telah memainkan peranan yang penting di Indonesia. Sektor industri manufaktur yang semakin berorientasi ekspor telah menopang ekonomi Indonesia. Perlu ditekankan pentingnya perspektif baru dalam kebijakan targeting industri. Secara umum kebijakan industri dapat diklasifikasikan ke dalam upaya sektoral dan horizontal. Upaya sektoral terdiri dari berbagai macam tindakan yang dirancang untuk mentargetkan industri-industri atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Upaya horizontal dimaksudkan untuk mengarahkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan kerangka persaingan dimana perusahaan-perusahaan melaksanakan usahanya (Kuncoro, 2007). Kebijakan pengembangan sektor industri yang dimaksud tentunya meliputi kegiatan industri pada berbagai jenis serta tingkatan mulai dari perusahaan besar hingga industri kecil dan menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UMKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Kompas, 14/12/2001 dalam Brata, 2003). Akan tetapi jika dilihat kondisi UMKM di Indonesia, dapat dikatakan bahwa UMKM kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kesadaran akan arti penting UMKM baru terlihat belakangan ini saja. Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UKM antara lain (Tambunan, 2001) fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan, relevansi UKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain, potensi UKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta peranan UKM dalam

jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah. Disebutkan pula dalam Kuncoro (2000) bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

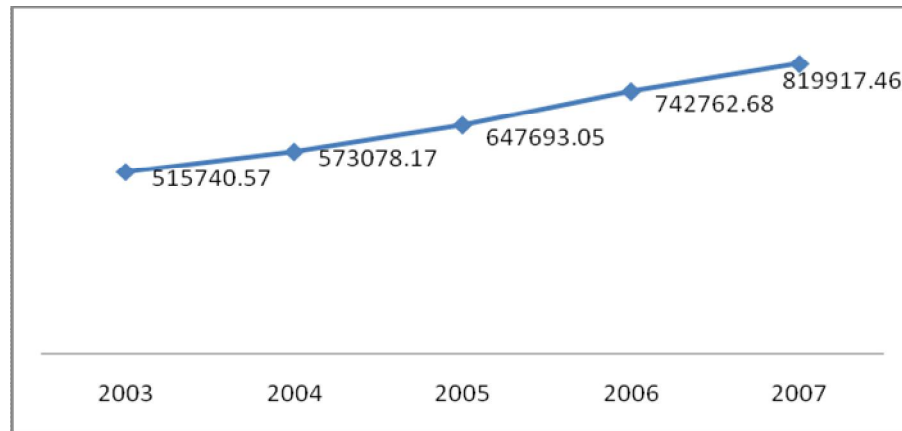
Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah yang sedang dan akan selalu berkembang. Berbagai sektor kehidupan muncul dan tumbuh di setiap penjuru wilayah kabupaten. Hal tersebut ditunjang dengan letak geografinya yang berada di dekat pusat pertumbuhan Kota Surakarta dengan aglomerasi perkotaannya yang bercirikan niaga, jasa, perdagangan, pendidikan dan industri. Selain itu, Kabupaten Sragen juga dilintasi oleh jalur jalan arteri primer yang menghubungkan wilayah Jawa Tengah dengan Jawa Timur, sehingga membuat pertumbuhan bagian-bagian wilayah tertentu semakin terpacu.

Dalam kaitannya dengan penyediaan lapangan pekerjaan, salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu pemberian kemudahan dalam perizinan pembangunan terutama pengadaan industri baru terutama untuk UMKM. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan serta terobosan probisnis di Kabupaten Sragen melalui revisi beberapa Peraturan Daerah, yang mana peraturan-peraturan terdahulu tentang proses perizinan yang berbelit-belit serta memakan biaya yang relatif mahal saat ini telah direvisi, tentunya atas prakarsa Bupati Sragen. Dalam pelaksanaan selama beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut ternyata mampu memacu pertumbuhan Kabupaten Sragen terutama peningkatan pendapatan daerah.

Melalui layanan prima, menurut Bupati Sragen Untung Wiyono, investasi yang dihasilkan industri besar naik 213% dari Rp110 miliar menjadi Rp 394,8 miliar. Otomatis penyerapan tenaga kerja di sektor industri juga terdongkrak 44,29% dari 28.976 orang menjadi 41.800 orang. Komitmen Untung untuk membesarkan UMKM juga tidak kepalang tanggung. UMKM pemula yang baru memulai usaha diberikan fasilitas gratis perizinan, sehingga menjadi legal dan dapat dijadikan modal untuk mengembangkan usaha. Lewat kebijakan ini, jumlah perusahaan yang memiliki perizinan (legalitas usaha) meningkat 30,1% dari 5.299 menjadi 6.913. Dari berbagai upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi pun ikut melambung, meningkat dari 4,53% pada tahun 2004 menjadi 5,06% tahun 2005. Karena memberikan layanan prima, keterlibatan masyarakat untuk beraktivitas terutama di sektor bisnis meningkat. Total swadaya masyarakat pada tahun 2005 mencapai lebih dari Rp 81 miliar (*www.disperindagsragen.com*).

Kemajuan industri di Kabupaten Sragen dapat pula diketahui dari sumbangan sektor industri terhadap PDRB yang semakin meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pertambahan nilai yang terjadi relatif meningkat dengan konstan, tidak ada lonjakan kenaikan atau penurunan secara drastis. Perlu diketahui bahwa perbandingan jumlah industri besar dan UMKM di Kabupaten

Sragen sekitar 10:90, sehingga dapat dikatakan kontribusi pendapatan sektor industri untuk PDRB sangatlah bergantung pada perkembangan UMKM. Grafik perkembangan pendapatan dari sektor industri di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2008

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Sektor Industri Kabupaten Sragen berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

Berdasarkan kondisi di atas terlihat bahwa di Kabupaten Sragen terdapat peningkatan jumlah industri dan pengaruhnya terhadap PDRB, sebagai hasil dari kebijakan baru yang diterapkan terutama tentang kemudahan perizinan dalam pembangunan industri baru. Kondisi tersebut tentunya sangatlah memungkinkan disertai dampak ikutan dari sisi negatif seperti masalah lingkungan atau lainnya. Alasan inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan studi terhadap implementasi berbagai kebijakan industri kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sragen, mengingat besarnya kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Kemudahan dalam perizinan pembangunan industri serta banyaknya terobosan baru dari Pemerintah Kabupaten Sragen tentunya menjadi prestasi tersendiri. Akan tetapi, prestasi tersebut seringkali diiringi dengan dampak-dampak negatif. Salah satunya yaitu adanya pabrik industri yang setelah dibangun ternyata tidak dapat dioperasikan. Hal tersebut sangatlah mungkin dikarenakan proses perizinan yang terlalu mudah dan kurangnya kontrol pemerintah sehingga pabrik tersebut kini hanya menjadi bangunan monumental saja. Selain itu juga terdapat beberapa industri dan merupakan salah satu industri unggulan yang saat ini kondisinya sedang terancam dikarenakan kurangnya modal dan pemasaran. Dampak lainnya yaitu masalah lingkungan terutama